

**KEBIJAKAN/PERATURAN TAHUN 2013
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tahun Anggaran : 2013

No.	Unit Kerja Penyusun Kebijakan	Jenis Kebijakan/Peraturan
1	Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi	2 Per.MenPANRB tentang Pedoman Pelaksanaan RB di Pusat dan Daerah
2.	Deputi Bidang Kelembagaan	1. Naskah Akademis RUU tentang organisasi/kelembagaan pemerintah 2. 2 Per.Men.PANRB <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Audit Organisasi • Pedoman Perumusan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah
3.	Deputi Bidang SDM Aparatur	1. RUU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 2. 14 RPP : <ul style="list-style-type: none"> • 5 peraturan pelaksanaan RUU ASN • Pendidikan Kedinasan; • Formasi PNS; • Pengadaan PNS; • Diklat Jabatan PNS; • Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS; • Pemberhentian PNS; • Sistem remunerasi SDM Aparatur Negara • Dana Pensiun dan tabungan Hari Tua PNS; • Sistem Asuransi Kesehatan PNS dan Peningkatan Penerimaan Manfaat Asuransi; 3. 2 Rperpres <ul style="list-style-type: none"> • Pegawai Tidak Tetap Pemerintah • Terkait SDM yang mengundurkan diri kompetensi tidak sesuai kebutuhan organisasi (Pensiun Dini/Exit Policy); 4. 20 PerMenPAN dan RB : Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu Baru
4.	Deputi Bidang Tata Laksana	1. 2 RUU tentang Administrasi Pemerintahan dan Tata Hubungan Pemerintahan 2. 1 RPP tentang Sistem Elektronisasi Pemerintah 3. 5 Per.Men.PANRB : <ul style="list-style-type: none"> • TNDE; • TND; • Tata Hubungan Kerja; • Pedoman Sarana Prasarana ; • Tata Laksana Dinas Luar Kantor (Jaldis)

No.	Unit Kerja Penyusun Kebijakan	Jenis Kebijakan/Peraturan
5.	Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	1. 2 RUU : <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pengawasan Internal Pemerintah • RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara 2. Per.MenPANRB Bidang Pengawasan: <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan masyarakat • Mekanisme penilaian dan Pengusulan WBK/WBBM Evaluasi APIP 3. 3 Per.Men.PANRB Bidang Akuntabilitas termasuk Pedoman Penyelerasan Kebijakan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja/GRMS
6.	Deputi Bidang Pelayanan Publik	3 Per.MenPANRB: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan (standar kompetensi dan pola karier jabatan fungsional pengawas pelayanan publik) • Kebijakan terkait dengan IKM (Revisi Kep.MenPAN No. 25 tahun 2004) • Kebijakan tentang <i>National Public Complaint Handling System (NPCHS)</i>

Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi